

**PENDAPATAN DAERAH PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

oleh:

Jessy Christine Mangowal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: jessymangowal@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah memiliki masalah antara lain, masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah yang ada, sehingga akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lemahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja daerah. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal. Objek penelitian ini yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa gambaran umum profil Provinsi Sulawesi Utara, dan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Karena apabila pendapatan daerah meningkat, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal.

Kata kunci: *pendapatan daerah, belanja modal*

ABSTRACT

The region's financial administration has a problem, which are the weakness of the local government's ability regarding to explore the existing local revenue, which will cause a direct influence on the region's ability to finance the regular budget and the development budget. The weakness of the region's ability to increase local revenues will also affect regional spending. Purpose of this research was to determine the influence of local revenue to capital expenditure. The object of this research is Government of Province of North Sulawesi. This research uses qualitative data in the form of a profile overview of Province of North Sulawesi, and quantitative data in the form of budget realization report revenue and government expenditure of Province of North Sulawesi. Analytical methods used are simple linear regression analysis. The survey result revealed that the regional revenue significantly influence in capital expenditure in Government of Province of North Sulawesi. Because if regional revenues increase, so will be followed by an increase in capital expenditure.

Keywords: *regional revenues, capital expenditures*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah provinsi, kabupaten, dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan pelaksanaan otonomi daerah provinsi, kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan berada di tangan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota. Rendahnya proporsi PAD tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah karena kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal masih sangat kecil. Dapat dilihat dari pembiayaan pembangunan daerah didominasi oleh subsidi pusat dibandingkan dengan yang diperoleh dalam PAD itu sendiri.

Daerah saat ini sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyatakan “Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia”. Dalam hal pembangunan senantiasa harus mengacu pada suatu perencanaan yang dijabarkan dalam Pola Dasar Pembangunan, Arah Kebijakan Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan perencanaan tidak lepas dari sumber pembiayaan yang tersedia maupun yang direncanakan dan urutan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja daerah adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja daerah. Hal yang dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Belanja modal antara lain berhubungan dengan masalah transportasi, orang, barang, dan jasa. Misalnya kualitas jalan (transportasi), perekonomian yang maju karena distribusi barang efisien jika sarana transportasi jalan memadai. Belanja modal juga berhubungan dengan bidang kesehatan melalui pembangunan rumah sakit dan puskesmas, juga berhubungan dengan bidang pendidikan melalui pembangunan sekolah, universitas, dan sebagainya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Mahmudi (2011:18) menyatakan akuntansi publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bastian (2009:15) menyatakan, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Tujuan akuntansi sektor publik, menurut *American Accounting Association* (1970) dalam Mardiasmo (2009:14) yaitu:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis suatu alokasi dan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Sifat dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Sifat dan karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan, akuntansi pemerintahan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, dan bersifat kaku karena bergantung pada peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Peran akuntansi pemerintahan berdasarkan Mahmudi (2011:13) yaitu pengelolaan keuangan negara, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini terdiri dari 18 bab dan 336 pasal. Berikut ini adalah jenis-jenis pendapatan daerah dan belanja daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006:

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 26

- 1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 27

- 1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum, dan
 - c. Dana alokasi khusus.
- 2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagi hasil pajak, dan
 - b. Bagi hasil bukan pajak.
- 3) Jenis dana alokasi umum khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 28

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 36

- 1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung, dan
 - b. Belanja langsung.
- 2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Pasal 26

- 1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - 1.3 Pajak daerah
 - 2.3 Retribusi daerah
 - 3.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4.3 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak
 - i. Pendapatan denda retribusi
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - k. Pendapatan dari pengembalian
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - n. Dihapus, dan
 - o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi pendapatan daerah secara luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 menjelaskan pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Darise (2008:137) menyatakan dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari teknis, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari teknis dan pemerintah daerah lain.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Hariardi (2010:14), menyatakan “belanja daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemerintahan provinsi/ kabupaten/ kota) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan”. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Darise (2008:141) menyatakan belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui pada seluruh SKPD sebagai pengguna anggaran. Darise (2008:139) menyatakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan, belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umum diperlukan secara periodik.

Belanja Modal

Darise (2008:141) mengemukakan bahwa belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Mahsun (2006: 52) menyatakan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal/investasi (sering disebut pengeluaran pembangunan) merupakan contoh anggaran modal. Belanja modal ini manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.

Yusuf (2010:22) menyatakan “Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya”. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian /pembebasan penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud siap pakai. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan, kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan siap pakai. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Silikin (2007)	Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.	Untuk mengetahui PAD, DAU, dan Belanja Modal di Jawa Barat, beserta hubungannya.	Analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.	PAD dan DAU berhubungan positif dengan Belanja Modal.	Menganalisis pendapatan daerah dan belanja daerah disuatu pemerintahan	Hubungan PAD, DAU, dengan Belanja Modal. Objek penelitian di Jawa Barat, dan Metode analisis data tidak menggunakan spss.
Didit (2008)	Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap belanja opeasi pada Pemkot Cimahi.	Untuk mengetahui pendapatan daerah, dan belanja operasi, serta pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja operasi Pemerintahan mengetahui pendapatan Kota Cimahi.	Analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.	Pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja operasi, analisis regresi menunjukkan bahwa nilai b adalah 0,829. (setiap perubahan pendapatan daerah Rp.1 milyar, akan diikuti perubahan belanja operasi 0,829 skala yang meningkat).	Menganalisis pendapatan daerah dan belanja daerah disuatu pemerintahan	Pengaruh Pendapatan daerah terhadap belanja operasi. Objek penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Cimahi Dan metode analisis data tidak menggunakan pengelolaan SPSS.
Sepang (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Operasi Pemerintahan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.	Untuk daerah, dan belanja operasi, serta pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Sangihe Kepulauan Sulawesi Utara.	Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.	Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap belanja operasi, analisis regresi menunjukkan bahwa nilai b adalah 0,477. (setiap perubahan pendapatan daerah Rp.1 milyar, akan diikuti perubahan belanja operasi 0,477 skala yang meningkat).	Menganalisis pendapatan daerah dan belanja daerah disuatu pemerintahan	Pengaruh Pendapatan daerah terhadap belanja operasi. Objek penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan metode analisis data (tidak menggunakan pengelolaan data SPSS).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu, penelitian deskriptif dalam bentuk uraian gambaran objek penelitian (Provinsi Sulawesi Utara), dan penelitian korelasional yang artinya penelitian yang melihat ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya (pengaruh variabel pendapatan daerah terhadap variabel belanja modal).

Tempat dan Waktu Penelitian

Kantor Gubernur Pemerintah Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus No.69, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Waktu penelitian mulai bulan Januari 2013 sampai bulan Mei 2013.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah studi pendahuluan, menentukan permasalahan, penetapan metode pengumpulan data, analisis data selama penelitian, analisa data setelah uji hipotesis, hasil dan kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi lapangan yang dilakukan melalui observasi langsung keobjek penelitian yaitu Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara yang dilakukan langsung kepada pemerintah/ pejabat bidang Akuntansi dalam Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu gambaran umum Provinsi Sulawesi Utara dan data dalam bentuk catatan atau dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005 samapai tahun 2011.
2. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur untuk mengemukakan dasar teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data kuantitatif, adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan diukur dalam skala numerik, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2011.
2. Data Kualitatif, adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian atau deskriptif dan tidak dapat diukur dalam skala numerik, yaitu tentang keadaan dan ruang lingkup objek penelitian, struktur pemerintah daerah dan fungsinya, serta visi dan misi Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji normalitas, yaitu menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi persyaratan asumsi normalitas.
- b. Uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya, model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas angka nol (0) pada sumbu Y.
- c. Uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) yaitu sebagai berikut:

- 1) $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ terjadi autokorelasi
- 2) $1,65 < 2,35$ tidak terjadi autokorelasi
- 3) $2,35 < DW < 2,79$ autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

2. Analisis Deskriptif

Metode analisis statistik deskriptif adalah suatu angka analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pengelolaan data menggunakan *program SPSS version 19,0*.

3. Analisis Regresi Sederhana

Metode analisis regresi sederhana adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan satu variabel. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara pendapatan daerah dengan belanja modal. Kuncoro (2009:150), menyatakan analisis linear digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Dimana :
 X= Pendapatan daerah
 Y= belanja modal
 a = konstanta
 b=koefisien regresi

a. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi (r) sebagai berikut:

0,00 – 0,199 = sangat rendah
 0,20 – 0,399 = rendah
 0,40 – 0,599 = rendah
 0,60 - 0,799 = kuat
 0,80 – 1,000 = sangat kuat

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah memperkirakan kontribusi variabel bebas (pendapatan daerah) terhadap naik turunnya variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi (r^2) adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil hubungan semua variabel dependen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 (satu) besarnya koefisien (r^2) suatu persamaan regresi, semakin besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

Pegujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan cara uji T. Kuncoro (2009:238) menyatakan “Uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara *individual* dalam menerangkan variasi variabel terikat.”. Rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

Ho : Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Ha : Pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk menguji pengaruh variabel X (pendapatan daerah) secara pasial atau sendiri-sendiri, dengan kriteria pengujian, jika t_{hitung} lebih besar ($>$) dari t_{tabel} maka hipotesa nol (Ho) ditolak, hipotesa alternatif (Ha) diterima. Apabila jika t_{hitung} lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} maka hipotesa nol (Ho) diterima, hipotesa alternatif (Ha) ditolak. Tingkat signifikansi (Sig), apabila hasil signifikan $< 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Apabila hasil signifikan $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

- Uji normalitas, menunjukkan bahwa data menyebar disekitargaris diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* tidak membentuk pola tertentu dan gambar menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol (0), artinya tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi.

c. Uji autokorelasi, menunjukkan bahwa nilai DW (Durbin Watson) sebesar 2,431 atau nilai $2,35 < 2,79$ maka variabel- variabel yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

2. Analisis Statistik

Rata-rata hitung dan standar deviasi dari variabel belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara selang 7 tahun (2005-2011) diperoleh sebesar Rp.145.262.679.212,2857 dengan standar deviasi sebesar Rp.81.456.296.786,25874. Sedangkan rata-rata hitung dan standar deviasi dari variabel pendapatan daerah dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara selang 7 tahun (2005-2011) diperoleh sebesar Rp.923.118.414.586,3156 dengan standar deviasi sebesar Rp.299.590.233.116,86444.

3. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 2. Analisis Regresi Sederhana (Coefficient Regresi).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	-78377562922.566	53202113246.995		-1.473	.201
PENDAPATAN DAERAH	.242	.055	.891	4.389	.007

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Output Pengelolaan SPSS, 2013.

Hasil perhitungan pada *spss coefficient regresi*, persamaan analisis regresi sederhana adalah $Y = -78377562922.566 + 0,242 X$. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, artinya jika pendapatan daerah meningkat maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika pendapatan daerah menurun maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menurun pula.

Hal ini berarti Pendapatan daerah sebesar Rp.0 (nol) maka belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan cenderung mengalami penurunan sebesar Rp.78.377.562.922,566 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Nilai b adalah 0,242 artinya bahwa setiap perubahan yang terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp.1.000.000.000; akan diikuti dengan perubahan pada belanja modal sebesar Rp.242.000.000;

- Koefisien korelasi (r) yang dihasilkan 0,89 atau 89,1% yang berarti $r = 0,80 - 1,000$ yaitu koefisien korelasinya sangat kuat antara variabel pendapatan daerah dan variabel belanja modal, dan juga hampir mendekati angka satu (1), menunjukkan angka positif yang berarti hubungan kedua variabel searah.
- Koefisien determinasi (r^2) yang dihasilkan 0,794 atau 79,4% yang berarti bahwa besarnya kontribusi variabel pendapatan daerah terhadap naik turunnya variabel belanja modal 79,4% dan sementara sisanya 20,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

Dari tabel analisis regresi sederhana uji T diketahui diketahui t_{hitung} sebesar 4,389. Dan t_{tabel} dengan taraf signifikan 5% atau 0,05, $t_{tabel} = (n)$ ukuran sampel yaitu 7 tahun $- 2 = 5$, maka t_{tabel} sebesar 2,570. Jadi nilai t_{hitung} sebesar $4,389 >$ nilai t_{tabel} 2,570. Kesimpulannya H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dan diketahui signifikan sebesar $0,007 <$ dari tingkat signifikan 0,05, maka H_0 ditolak H_a diterima. Artinya variabel pendapatan daerah secara individual berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Sulawesi Utara.

Pembahasan

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah adalah dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengurus rumah tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Pendapatan daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Apabila pendapatan daerah semakin meningkat, maka akan diikuti oleh semakin

meningkatnya belanja modal. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis regresi yang dihasilkan pendapatan daerah dengan belanja modal, menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp.0 (nol) maka belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan cenderung mengalami penurunan sebesar Rp.78.377.562.922,566 dan nilai b adalah 0,242 artinya bahwa setiap perubahan yang terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp.1.000.000.000; akan diikuti dengan perubahan pada belanja modal sebesar Rp.242.000.000.

Koefisien korelasi (r) variabel pendapatan daerah (X) dan variabel belanja modal (Y) yang dihasilkannya sangat kuat atau 0,89 atau 89,1 %, dan juga hampir mendekati angka satu (1), serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti hubungan kedua variabel searah. Diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4,389 > nilai t_{tabel} 2,570, dan signifikan sebesar 0,007 < dari tingkat signifikan 0,05, maka H_0 ditolak H_a diterima. Artinya variabel pendapatan daerah secara individual berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Sulawesi Utara. Pendapatan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terhadap pos-pos penerimaan PAD telah dilakukan secara memadai. Sedangkan belanja modal menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah, maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan keadaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami perkembangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu: Pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, karena jika pendapatan daerah meningkat maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika pendapatan daerah menurun maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menurun pula.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian: Untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pembaharuan dan penyempurnaan beberapa peraturan daerah yang mengatur pendapatan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, mengingat pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar efisien dan efektif ditahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks. Jakarta.
- Didit, Aditya. 2008. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Operasi Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/937> diakses tanggal 22 Januari 2013
- Hariardi. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset dan Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Uji Press. Yogyakarta.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. G/ BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Republik Indonesia. *Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. *Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2000 Pasal 5*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Sepang, Gerarda. 2012. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Operasi Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara*. *Skripsi*. Universitas Katolik De la sale Manado. Manado.
- Silikin, Ikin. 2007. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.Akuntansi/196510122001121-IKIN_SOLIKIN/Skripsi_PAD.pdf diakses tanggal 22 Januari 2013
- Yusuf. 2010. *Langkah-langkah Pengelolaan Aset Dearah Menuju Pengelolaan keuangan daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta